

IDENTIFIKASI PENGEMBANGAN SEKTOR PERTANIAN MELALUI PENDEKATAN KLASTER DI DISTRIK ARSO TIMUR KABUPATEN KEEROM

Musfira

Staf Pengajar Pada Studi Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota USTJ

Email : fira.naja3@yahoo.com

Abstract

Salah satu strategi pengembangan wilayah yang sedang digalakkan saat ini adalah dengan pengembangan ekonomi lokal (PEL) yaitu dengan memanfaatkan potensi yang terdapat di daerah tersebut. Dalam melakukan identifikasi pengembangan ini, metode yang digunakan adalah metode analisa kualitatif yakni menilai hasil pengembangan sektor pertanian melalui persepsi pemerintah setempat dan pelaku usaha di sektor pertanian di Distrik Arso Timur Kabupaten Keerom.

Penelitian ini berkaitan dengan instrumen pengembangan sektor pertanian antara lain aktivitas dalam sektor pertanian, stakeholder yang terlibat dan hasilnya.

Dampak dari proses perencanaan yang tidak baik ternyata memberi hasil yang tidak baik pula dengan tidak terjawabnya permasalahan dari pelaku usaha yang mengakibatkan kurang dan tidak optimalnya penjelasan mengenai hasil yang diinginkan, efek, atau konsekuensi yang akan terjadi dari pelaksanaan program atau kegiatan. Dimana hak itu menjadi sebuah ukuran jangka panjang utama mengenai keberhasilan atau efektivitas strategi yang telah ada. Selain itu, keterlibatan stakeholder yang terlibat dalam proses perencanaan juga belum dapat memberikan kontribusi sesuai dengan peranannya. Sehingga, kondisi sektor pertanian mengalami stagnansi bahkan penurunan.

Kata Kunci : Pengembangan, sektor pertanian, ekonomi lokal, kluster

1. PENDAHULUAN

Kabupaten Keerom yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Bouven Digul, Kabupaten Asmat, Kabupaten Mappi, Kabupaten Teluk Wondama, Kabupaten Teluk

Bintuni di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2002 No.129, Tambahan lembaran Negara No.4245), diresmikan pada tanggal 12 April 2003. Kabupaten Keerom definitif pada Bulan Oktober Tahun 2005 dengan ditandai pelantikan Bupati dan Wakil Bupati periode tahun 2005 – 2010, melalui Pilkada Langsung.

Terbitnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah, telah memberikan kewenangan kepada Daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dalam

rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta keragaman daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pengembangan ekonomi lokal (PEL) merupakan proses membangun dialog dan kemitraan aksi para pihak yang meliputi pemerintah daerah, para pengusaha, dan organisasi-organisasi masyarakat lokal atau dalam penertian lain yaitu pengelolaan sumberdaya alam pada suatu daerah oleh pemerintah setempat yang berbasiskan masyarakat dimana dalam pengelolaannya pemerintah daerah melakukan penataan dan bekerjasama dengan sektor swasta maupun dari mereka sendiri untuk menciptakan lapangan kerja baru dan merangsang pertumbuhan wilayah. Dimana pilar-pilar pokok strateginya adalah meningkatkan daya tarik, daya tahan, dan daya saing ekonomi lokal. Menurut Blakely dalam Munir 2002, tujuan utama dari pengelolaan ekonomi lokal (PEL) adalah menciptakan lapangan kerja baru dan merangsang pertumbuhan wilayah.

Fokus dari PEL adalah pengembangan kluster usaha yang sering disebut sebagai mesin dari ekonomi lokal. Dengan membentuk kluster

maka usaha-usaha yang ada di daerah baik itu skala kecil, menengah maupun besar dapat menjalin hubungan kerjasama sehingga akan dapat merangsang kemudahan dalam memperoleh bahan baku maupun memenuhi kebutuhan akan jasa ataupun produk yang lebih luas lagi (*multiplier effects*). Dengan adanya efek berganda dari klaster maka diharapkan akan lebih banyak memperluas lapangan pekerjaan dan pertumbuhan wilayah akan cepat terwujud.

Keberadaan klaster usaha juga memperkuat ketahanan ekonomi wilayah karena pada dasarnya klaster usaha mengandalkan potensi wilayah yang ada dan tidak bergantung pada ekspor.

Pada hakekatnya pengembangan sektor pertanian berbasis klaster merupakan upaya sistematis dan terencana yang dilakukan oleh pemangku kepentingan daerah atas produk-produk yang dimiliki atau dikuasai serta telah ditentukan dan disepakati bersama berdasarkan kriteria-kriteria tertentu (daya tarik dan daya saing), untuk dikembangkan melalui keterkaitan dengan unsur-unsur pendukungnya dan diintegrasikan dalam manajemen mata rantai pasokan.

Masalah pokok dalam pembangunan daerah terletak pada penekanan terhadap kebijakan-kebijakan pembangunan yang didasarkan pada kekhasan daerah yang bersangkutan (*endogenous development*) dengan menggunakan potensi sumberdaya fisik secara lokal (daerah). Dengan perencanaan yang baik dan kebijakan yang tepat akan mempengaruhi keberhasilan pembangunan ekonomi daerah tersebut. Todaro mengatakan bahwa keberhasilan pembangunan ekonomi ditunjukkan oleh tiga nilai pokok yaitu berkembangnya kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokoknya, meningkatkan rasa harga diri, dan meningkatkan kemampuan masyarakat untuk memilih.

Melalui skema Otonomi Daerah, Pemerintah Daerah bersama dengan pihak swasta dan masyarakat akan semakin memainkan peranan yang lebih besar dalam meningkatkan daya saingnya guna mewujudkan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat di wilayahnya. Semakin pentingnya kedudukan daerah dalam menentukan daya saingnya, menunjukkan semakin mendesaknya pelaksanaan kebijakan desentralisasi dalam rangka reformasi administrasi pemerintahan, pembangunan dan mutu pelayanan publik.

Pada hakekatnya pengembangan ekonomi lokal melalui pendekatan klaster merupakan upaya sistematis dan terencana yang dilakukan oleh pemangku kepentingan daerah atas produk-produk yang dimiliki atau dikuasai serta telah ditentukan dan disepakati bersama berdasarkan kriteria-kriteria tertentu (daya tarik dan daya

saing), untuk dikembangkan melalui keterkaitan dengan unsur-unsur pendukungnya dan diintegrasikan dalam manajemen mata rantai pasokan.

2. KAJIAN LITERATUR

2.1. Teori Perencanaan

2.1.1. Teori Perencanaan

Teori secara terminologis bermakna sebagai anggapan-anggapan yang dikemukakan sebagai suatu penjelasan berdasar alasan yang dilandasi seperangkat fakta. Menurut Webster (1959) dapat berarti sebagai suatu cara untuk memahami tentang sesuatu hal melalui suatu kerangka berfikir, yang dapat menginterpretasi fakta dan pengalaman. Perencanaan dapat diartikan dari berbagai sudut pandang, bergantung pada segi obyeknya. Menurut Gillie (1971), pada hakekatnya perencanaan mengandung empat aspek utama, yaitu:

1. tujuan yang lebih baik pada masa mendatang;
2. keberadaan dan ketersediaan sumberdaya (alam manusia, modal, informasi);
3. keberadaan kendala atau keterbatasan; dan
4. efisiensi dan efektifitas.

2.1.2. Perkembangan Teori Perencanaan

Sejak masa Yunani, ide perencanaan sudah dikenali, yakni sejak munculnya kota-kota berpola pada masa itu, seperti kota-kota di lembah Euphrat dan Acropolis. Akan tetapi perencanaan modern, baru dikenal sejak akhir abad 19 di Eropa Barat sejak masa revolusi industri.

Pada awal perkembangan tidaklah didasarkan pada teori, namun justru teori perencanaan berkembang sebagai kelanjutan dari pengalaman tentang usaha manusia dalam mengatasi tantangan kondisi lingkungan kehidupannya. Adanya degradasi aspek sosial budaya manusia, sosial ekonomi dan biofisik yang menyangkut kemandirian, akibat terjadinya industrialisasi secara besar-besaran di Inggris pada akhir abad 19, maka timbul konsep-konsep dari para reformis. Karl Marx sebagai reformis politik menyoroti bahwa degradasi kehidupan itu disebabkan oleh adanya kelompok kapitalis, yang berkeinginan meningkatkan keuntungan dengan cara memanfaatkan tenaga manusia murah (kelompok proletar). Di sisi lain Geddes sebagai seorang *environmental reformist* mengemukakan 'trinitas' dalam kehidupan yakni *Folk-Place-Work*. Langkah tersebut dijabarkan ke dalam konsep yang lebih konkrit oleh Howard (1898) yang dikenal sebagai seorang reformis kemasyarakatan pada ide *Garden City* sebagai kota masa mendatang. Keseluruhan itu pada dasarnya merupakan upaya untuk mengembalikan manusia kepada lingkungan yang manusiawi. Landasan konseptual tersebut secara nyata diwujudkan

kedalam bentuk wilayah kota-kota baru yang dikembangkan antara tahun 1902 - 1920.

Dasar konsep di atas menjadi pangkal tolak teori perencanaan yang dikembangkan untuk memperbaiki penyimpangan dalam kegiatan perencanaan pada awal abad 20-an. Sementara itu sejak tahun 1930-an telah dikembangkan pula teori dalam perencanaan berdasarkan ilmu geografi manusia dan geografi ekonomi, seperti tim-bulnya *Central Place Theory* dari Walter Christaller dan lainnya. Menurut McLoughlin (1971), teori perencanaan maupun teori-teori dalam perencanaan mulai menonjol sebagai suatu cabang ilmu yang mandiri pada sekitar tahun 1950-an. Sejak saat itu teori perencanaan tumbuh sebagai suatu bentuk cabang ilmu pengetahuan yang aktif dan mandiri (Faludi, 1973).

Pada rangkaian perkembangan tersebut dapat diamati bahwa generasi teori perencanaan bermula dari adanya tuntutan kebutuhan tentang penataan lingkungan manusia dan lingkungan fisik. Penataan lingkungan manusia berkembang pada terbentuknya berbagai teori-teori perilaku (*behavioral theories*) serta konsep-konsep perilaku (*behavioral concepts*). Teori-teori tersebut menjadi alat untuk melandasi pemikiran yang berkaitan dengan perubahan di dalam sistem masyarakat dan sistem lingkungan fisik. Oleh karenanya, berkembanglah teori sistem, yakni teori perilaku dan teori fisik sebagai teori yang berkaitan di dalam upaya mencari pemecahan masalah. Perkembangan ini ditunjang oleh berbagai teori lain seperti matematika, fisika, dan biologi.

2.2. Pendekatan Perencanaan Wilayah

2.2.1. Perkembangan Pendekatan Perencanaan

Pendekatan perencanaan wilayah secara umum dapat dibedakan menjadi dua, jenis yakni perencanaan pembangunan ekonomi, dan perencanaan fisik. Kedua jenis pendekatan ini dapat diuraikan secara singkat sebagai berikut.

A. Perencanaan Pembangunan Ekonomi

Jenis perencanaan ini bertujuan untuk mencapai suatu tingkat perkembangan ekonomi tertentu suatu wilayah. Pada dasarnya perencanaan ini berkaitan erat dengan struktur serta pertumbuhan dari ekonomi tingkat nasional. Perhatian utama pendekatan perencanaan ini pada penambahan kapasitas produksi, dan perubahan neraca antar sektor. Oleh karenanya perencanaan ini bersifat makro, dan menghasilkan rencana komprehensi yang mencakup segala sektor (misalnya REPELITA). Pendekatan perencanaan ini juga lebih menekankan pada penyusunan rencana tertulis yang berguna sebagai *blueprint for the future* atau rencana induk masa mendatang. Pada umumnya rencana

blueprint telah menentukan berbagai tujuan dan sasaran tertentu yang perlu dicapai dalam periode perencanaan tertentu (Lima tahunan misalnya). Manfaat pendekatan perencanaan pembangunan ekonomi sejak tahun 1960 dianggap tidak memuaskan, bahkan orang tidak percaya terhadap manfaat pendekatan ini, dengan alasan sebagai berikut.

- Tujuan dan sasaran yang ditentukan dalam rencana jarang tercapai, dan perencanaan-annya sangat kecil pengaruhnya terhadap laju ekonomi yang seolah-olah berkembang sendirinya,
- Rencana blueprint terlalu kaku tidak memiliki kelonggaran untuk penyesuaian rencana perkembangan baru.
- Komunikasi antara para perencana, penguasa, dan pejabat kurang terjalin erat.
- Timbulnya kesadaran bahwa pembangunan bukan sekedar pertumbuhan ekonomi saja, dan pertumbuhan itu justru menghalangi pemerataan.

Ketidakpuasan terhadap kelemahan pendekatan ini, menyebabkan terjadinya perluasan bidang maupun pendekatan dari perencanaan tersebut sejak tahun 1970-an, antara lain sebagai berikut.

a) Jangkauan perencanaan pembangunan wilayah lebih diperluas. Disamping jangkauan pertumbuhan dan perubahan struktur ekonomi nasional, perencanaan juga memperhatikan tujuan politik, kebutuhan sosial, serta pelestarian lingkungan. Oleh karena itu, metode perencanaan pun mengalami perubahan:

- Timbulnya analisis untung-rugi suatu rencana tidak lagi ditentukan oleh faktor keuangan saja, tetapi jika dilihat dari aspek sosial dan lingkungan.
 - Faktor ekonomi dan non ekonomi tidak hanya diperhatikan secara terpisah, tetapi didekati secara terpadu.
 - Liputan faktor non ekonomi mengharuskan keterlibatan pakar-pakar ilmu lain, seperti sosiologi, geografi, dan sebagainya; dengan metode masing-masing.
 - Cabang-cabang perencanaan pembangunan yang timbul sebagai spesialisasi tersendiri, misalnya perencanaan sosial dan perencanaan lingkungan.
 - Perencanaan pembangunan mulai memperhatikan perkembangan wilayah disamping perkembangan tingkat nasional.
- b) Perencanaan pembangunan hendaknya dapat mengurangi ketidakmerataan kemakmuran antar kelompok masyarakat maupun antar daerah. Dengan demikian perencanaan seharusnya digunakan sebagai alat mencapai pemerataan (*planning as egalitarian tool*).

Tugas yang baru ini mencakup juga adopsi suatu metode yang dapat membandingkan dan menilai pengaruh-pengaruh program dan proyek pada golongan masyarakat berpendapatan rendah dan daerah tertinggal.

- c) Dalam pendekatan baru perencanaan tidak hanya mempersiapkan dan menulis rencana, melainkan juga ikut mengelola, membimbing pelaksanaan serta menyoroti perkembangan selama pelaksanaan rencana. Jika terjadi perkembangan, baik secara nasional (*intern*) maupun internasional (*extern*), yang akan mempengaruhi laju rencana, maka segera mendapat respon untuk diambil tindakan secara tepat. Dengan demikian perencanaan dijadikan sebagai proses berkesinambungan, dimana kesesuaian terapan pada pengembangan ekonomi dan sosial dapat diuji secara berkala. Artinya, perencanaan bergeser dari rencana induk (*blueprint*) ke rencana yang *flexible* atau mudah disesuaikan.

Pergeseran sifat perencanaan tersebut menyebabkan pula perubahan pokok dalam bidang metode berikut.

- Perencanaan pembangunan tidak lagi hanya memperhatikan tingkat makro, namun juga merencanakan tingkat wilayah, sektor, malah program dan proyek. Khusus perencanaan tingkat proyek dilengkapi dengan teknik penaksiran manfaat yang rinci.
- Perubahan perencanaan lebih lanjut bersifat petunjuk pelaksanaan demi tercapainya tujuan dan sasaran, maka diadopsi teknik penganggaran belanja untuk mengendalikan perencanaan penyediaan biaya.
- Teknik monitoring menjadi penting untuk mengetahui kemajuan dan masalah selama pelaksanaan, sehingga jika diperlukan perencanaan selanjutnya disesuaikan.
- Periode perencanaan tidak begitu mudak lagi, sehingga rencana berlanjut dari waktu ke waktu sesuai dengan perkembangan nyata.

B. Perencanaan Fisik Wilayah

Bahasan perkembangan perencanaan fisik pada umumnya mengemukakan uraian hakekat manusia dalam kaitannya dengan lingkungan fisik. Pendapat klasik selalu mengasosiasikan pengertian perencanaan fisik adalah perencanaan kota atau lingkungan permukiman. Pendapat tersebut dewasa ini disadari sebagai pendapat pengertian perencanaan dalam arti sempit.

Hal ini mengingat bahwa perencanaan sebenarnya menyangkut berbagai aspek kehidupan yang luas, meliputi segi sosial budaya, ekonomi, dan politik. Dalam hal perencanaan fisik merupakan bagian dari usaha untuk menjawab perubahan-perubahan pada masyarakat yang aspeknya luas tersebut. Perencanaan fisik

merupakan kegiatan perencanaan yang mencakup pengelolaan penggunaan lahan dan tata ruang. Kegiatan-kegiatan itu mencakup penyusunan rancangan rinci (misalnya lingkungan kota sampai dengan penentuan umum penggunaan ruang suatu wilayah. Jenis perencanaan ini paling populer dan berkembang di negara-negara maju. Pada awalnya perencanaan fisik memusatkan perhatian pada penetapan penggunaan lahan untuk berbagai fungsi, pertanian, perindustrian, permukiman, transportasi perdagangan, rekreasi dan lainnya. Tujuan utama untuk mendapatkan kecocokan lahan dan lokasi dengan fungsi yang paling menguntungkan masyarakat. Dengan demikian sasaran metodenya menyusun rencana induk (*blueprint*) yang menentukan fungsi mana harus diterapkan di suatu lokasi lahan tertentu. Rencana induk tersebut didasarkan atas survei kenyataan penggunaan lahan di lapangan, untuk dibandingkan dengan penggunaan yang semestinya menurut anggapan perencana. Jika kedua aspek tersebut tidak sesuai, maka disusun rencana perubahan.

2.3. Pertanian dalam Pengembangan Ekonomi Lokal

Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL) merupakan suatu konsep yang bertumpu pada lokalitas dalam melaksanakan pembangunan di suatu daerah (wilayah). Menurut Blakeley (1989): *"Local economic development is not merely new rhetoric, but represents a fundamental shift in the actors as well as activities associated with economic development. It is essentially a process by which local government and/or community-based group manage their existing resources and enter new partnership arrangements with the private sector, or with each other, to create a new jobs and stimulate economic activity in a well-defined economic zone."* Serupa dengan definisi di atas, *World Bank Urban Development Unit* (2003) menyatakan bahwa: *"Local economic development is the process by which public, business and nongovernmental sector partners work collectively to create better conditions for economic growth and employment generation."*

Lebih lanjut Coffey (1985) mengemukakan bahwa pada prinsipnya konsep pengembangan ekonomi lokal ditentukan oleh tumbuh-kembangnya kewirausahaan lokal yang ditunjang sistem kelembagaan lokal di wilayah tersebut, mencakup: industri, asosiasi kegiatan usaha, pengusaha lokal, pemerintah lokal, dan komponen lokal lainnya.

Terdapat dua poin penting yang harus digarisbawahi dari pemahaman di atas. Pertama, PEL menekankan adanya perubahan mendasar pada aktor-aktor yang terlibat dalam pembangunan. Pemerintah tidak lagi menjadi aktor tunggal yang menentukan pembangunan, tetapi

juga harus melibatkan aktor lain seperti masyarakat, dunia usaha, Lembaga Swadaya.

Menurut Blakely and Bradshaw (1994), yang dimaksud dengan pengembangan ekonomi lokal adalah proses dimana pemerintah lokal dan organisasi masyarakat terlibat untuk mendorong, merangsang, memelihara, aktivitas usaha untuk menciptakan lapangan pekerjaan sedangkan menurut Munir (2007) pengembangan ekonomi lokal (PEL) yaitu suatu proses yang mencoba merumuskan kelembagaan-kelembagaan pembangunan di daerah, peningkatan kemampuan SDM untuk menciptakan produk-produk yang lebih baik serta pembinaan industri dan kegiatan usaha pada skala lokal. Jadi, pengembangan wilayah dilihat sebagai upaya pemerintah daerah bersama masyarakat dalam membangun kesempatan-kesempatan ekonomi yang cocok dengan SDM, dan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam dan kelembagaan secara lokal.

Menurut Blakely dalam Supriyadi (2007, h.103-123), bahwa keberhasilan pengembangan ekonomi lokal dapat ditinjau dari beberapa indikator, yaitu:

- perluasan kesempatan bagi masyarakat kecil dalam kesempatan kerja dan usaha;
- perluasan bagi masyarakat untuk meningkatkan pendapatan;
- pemberdayaan lembaga usaha mikro dan kecil dalam proses produksi dan pemasaran; dan
- pemberdayaan kelembagaan jaringan kerja kemitraan antara pemerintah, swasta, dan masyarakat lokal.

Peran strategis sektor pertanian menurut Sumodiningrat (1999) dan Todaro (2000), terkait pengembangan ekonomi lokal di suatu wilayah, adalah:

- Pertanian menyerap tenaga kerja wilayah.* Kondisi ini dapat terjadi jika pertanian berkembang secara menyeluruh, meliputi: kegiatan hulu, kegiatan bertani itu sendiri, kegiatan hilir, dan kegiatan penunjang (transportasi, keuangan, kelembagaan, dan sebagainya). Selain itu, pertanian merupakan pekerjaan yang sesuai dengan keahlian dan kultur masyarakat perdesaan (tujuan utama PEL tercapai).
- Pertanian memenuhi kebutuhan pangan lokal.* Selain berpotensi sebagai komoditas ekspor, produk pertanian juga dapat memenuhi kebutuhan pasar domestik (lokal). Terkait PEL, hal ini jelas memberikan keuntungan karena akan memperkecil nilai impor melalui produk substitusi impor. Selisih antara nilai ekspor-impor merupakan nilai tambah yang diterima oleh wilayah tersebut.
- Pertanian memacu pertumbuhan investasi wilayah.* Pertanian yang berkembang pesat akan menarik investor ke wilayah tersebut.

Investasi merupakan satu dari tiga faktor (ekspor dan konsumsi lokal) penting yang dibutuhkan oleh wilayah untuk berkembang. Namun, investasi tersebut harus diarahkan pada sektor berbasis lokal. Industri yang berkembang adalah industri yang mengolah hasil pertanian lokal, bukan industri *foot-loose*. Apabila hal ini tidak terwujud, investasi yang dilakukan justru memperbesar kebocoran wilayah (*region leakages*).

- Pertanian sebagai pemerata kesenjangan wilayah (regional disparity).* Pertanian bisa dijadikan sebagai alat pembangunan desa-desa tertinggal mengingat hanya pertanian yang sesuai dengan kondisi (karakteristik) perdesaan. Pembangunan pertanian yang terencana dan dikelola dengan baik akan memacu perkembangan desa-desa tersebut, dan secara makro akan mengurangi kesenjangan antar wilayah.

2.4. Perspektif Kluster

Kluster merupakan hubungan antar satu jenis kegiatan ekonomi, mulai dari kegiatan produksi primer, pengepul, pengolah setengah jadi atau jadi (industri menengah, besar), pedagang dan eksportir, serta kegiatan dan pelayanan penunjang seperti lembaga keuangan, pelayanan usaha, pendidikan, penelitian, dan lainnya. Sebagaimana didefinisikan oleh pakar daya saing Michael Porter (1998): "*Clusters are geographic concentrations of interconnected companies and institutions in a particular field. Clusters encompass an array of linked industries and other entities important to competition.*" Keterkaitan (*linkage*) antar kegiatan ekonomi adalah penting dalam pengembangan kluster karena hubungan antar kegiatan yang saling komplementer akan menunjang keunggulan (Sa'id et al. 2007). Hal ini menyangkut bukan saja soal efisiensi biaya transpor melainkan juga *matching* spesifikasi yang dibutuhkan masing-masing akan lebih mudah dilakukan, karena menyangkut pertukaran "*knowledge, relationships, motivation*" tersebut



Gambar 1
Tahapan Pengembangan Kluster (Sumber : Munir et al. (2007))

3. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dilakukan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Secara harfiah, metode deskriptif adalah metode penelitian untuk membuat gambaran mengenai situasi atau kejadian, sehingga metode ini berkehendak mengadakan akumulasi data dasar belaka. Analisa kualitatif dilakukan dalam bentuk uraian deskriptif yang digunakan untuk menguraikan atau menjelaskan data atau informasi, sehingga mudah dimengerti termasuk menyimpulkan suatu keadaan seperti baik, buruk, tinggi, rendah dan lain-lainnya. Tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk memberikan gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat yang diselidiki. Penelitian ini akan memberikan gambaran tentang manfaat dari pendekatan klaster yang diterapkan dalam identifikasi pengembangan sektor pertanian di Distrik Arso Timur Kabupaten Keerom. Dalam mengumpulkan data digunakan teknik:

Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Teknik pengumpulan data dengan cara menelaah dan mempelajari buku-buku tertulis dan laporan-laporan lainnya dalam meneliti teori dan metode yang berhubungan dengan penelitian.

Studi Lapangan (*Field Research*)

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengunjungi secara langsung terhadap objek yang akan diteliti, data tersebut penulis peroleh dengan cara:

- a. Metode Wawancara dengan menggunakan schedule questionair ataupun interview guide
- b. Metode Observasi

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum

Secara geografis Distrik Arso Timur terletak pada posisi $140^{\circ} 52' 31.88^{11}$ Bujur Timur dan $02^{\circ} 55' 50.84^{11}$ Lintang Selatan. Pada sebelah utara berbatasan dengan Distrik Muara Tami, selatan berbatasan dengan Distrik Waris dan Senggi, sebelah barat berbatasan dengan Distrik Arso, dan sebelah timur dengan Negara Papua New Guinea. Dengan total luas wilayah pada Distrik Arso Timur sebesar $461,16 \text{ Km}^2$.

Distrik Arso Timur yang merupakan salah satu distrik di Kabupaten Keerom yang berbatasan langsung dengan negara tetangga PNG serta merupakan daerah penyangga Kota Jayapura sebagai Ibukota Provinsi Papua, memiliki keunggulan komparatif bila dibandingkan dengan kabupaten pemekaran lain di Provinsi Papua. Dengan letak yang demikian merupakan keuntungan tersendiri bagi prospek

pengembangan kehidupan perekonomian dan perdagangan lintas daerah maupun lintas negara. Dari sisi pengembangan ekonomi merupakan potensi besar untuk memenuhi kebutuhan sandang dan pangan ibukota Provinsi dan Kabupaten lainnya termasuk pengembangan pasar ekspor ke Negara tetangga PNG. Potensi sumber daya lahan masih di dominasi oleh Kawasan hutan yang mempunyai fungsi memproduksi hasil hutan berupa kayu, non kayu dan hasil hutan lainnya, sedangkan lahan areal penggunaan lainnya masih cukup luas yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan kawasan budidaya yang meliputi kawasan pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan air tawar, pengembangan jasa dan ekonomi lainnya.

Berdasarkan data Badan Pertanahan Nasional jenis tanah di wilayah Distrik Arso Timur berjenis PMK (Podsolik Merah Kuning. Distrik Arso Timur merupakan daerah terendah dengan ketinggian 0–1000 m diatas permukaan laut (dpl). Distrik Arso Timur dengan batuan penyusun yang dominan adalah formasi batuan aluvium dan endapan sungai. Formasi ini terdiri dari jenis material mulai dari lempung, pasir halus dengan ketebalan berdasarkan hasil geolistrik diperkirakan 2,5–84 meter. Keberadaan akuifer tertekan (*confined aquifer*) mulai di bawah 80 m, sedangkan akuifer dangkal (*unconfined aquifer*) ditemukan mulai kedalaman 2,5–7 m. Material penyusun terdiri dari pasir halus lempungan sampai sampai pasir lempungan. Perlapisan akuifer sangat tipis, sehingga air tanah relatif kecil. Pada Distrik Arso Timur ditemukan rata-rata keasaman netral sampai dengan asam.

Pertumbuhan penduduk akan meningkatkan pasar/ perekonomian suatu daerah. Berdasarkan hasil pemutakhiran (update) Sensus Penduduk 2013 jumlah penduduk Distrik Arso Timur adalah 5.099 jiwa. Dimana tiap tahun mengalami peningkatan. Penduduk laki-laki merupakan populasi terbesar yaitu 2.919 jiwa atau sebesar 57,01 %, sedangkan penduduk perempuan berjumlah 2.180 jiwa atau 42,93 % dari seluruh penduduk di Distrik Arso Timur. Dengan luas wilayah sebesar $461,16 \text{ Km}^2$ berarti kepadatan penduduknya hanya mencapai 11,06. Artinya setiap 1 km^2 dihuni kurang lebih 11 orang penduduk.

Tabel 4.1
Perkembangan Pertambahan Penduduk
Distrik Arso Timur
Tahun 2010–2013

Tahun	Jumlah
2010	2.810
2011	4.899
2012	5.061
2013	5.099

Sumber : Keerom Dalam Angka 2010-2013
(BPS Kab.Keerom)

Tabel 4.2
Distribusi dan Kepadatan Penduduk Distrik Arso
Timur Tahun 2013

Luas Daerah	Jumlah Penduduk	Kepadatan Per Km ²
461,16	5 099	11

Sumber : Keerom Dalam Angka 2013
(BPS Kab.Keerom)

Tabel 4.3
Jumlah Penduduk Distrik Arso Timur Menurut
Jenis Kelamin Tahun 2013

Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Sex Ratio
2 890	2 209	5 099	130,82

Sumber : Keerom Dalam Angka 2013
(BPS Kab.Keerom)

Jumlah rumah tangga di Distrik Arso Timur sebanyak 1.140 rumah tangga, jumlah terbanyak terdapat di Kampung Wonorejo sebanyak 440 atau 36,73 % dari jumlah rumah tangga yang ada pada Distrik Arso Timur, sedangkan Kampung Kriku memiliki jumlah rumah tangga terkecil sebanyak 22 rumah tangga atau 1,84 % dari jumlah rumah tangga yang terdapat di Distrik Arso Timur.

Tabel 4.4
Banyaknya Rumah Tangga dan Penduduk
menurut Jenis Kelamin
Distrik Arso Timur 2013

Rumah Tangga	Penduduk		
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.140	2.890	2.209	5.099

Sumber : Keerom Dalam Angka 2010-2013

(BPS Kab.Keerom)

Kampung Skofro memiliki wilayah terluas yaitu 79,96 Km² atau sebesar 17,34 persen dari total luas wilayah pada Distrik Arso Timur. Sedangkan Kampung Wambes merupakan daerah yang memiliki wilayah terkecil dengan luas hanya 7,44 Km² atau sebesar 0,16 persen dari total luas Distrik Arso Timur. Kampung Wembi memiliki jarak terjauh dari Ibukota Distrik yaitu sepanjang 42 Km dan dengan kendaraan roda 2 berkecepatan rata-rata 40-60 Km/jam, dapat ditempuh dengan waktu 1 jam 40 menit. Sedangkan jarak terdekat adalah Kampung Yetty yaitu sejauh 1 Km dan dengan kendaraan roda 2 berkecepatan rata-rata 40-60 Km/jam, dapat ditempuh dengan waktu 5 menit.

Distrik Arso Timur memiliki luas lahan bukan sawah sebesar 1025,9 Ha dan lahan sawah seluas 40,68 Ha dimana yang terluas berada di Kampung Wonorejo. Ketinggian Distrik Arso Timur berkisar antara 72 - 134 meter dpl. Kampung Pyawi adalah kampung tertinggi dari permukaan laut, sedangkan yang terendah adalah Kampung Kriku. Berdasarkan catatan dari Balai Meteorologi dan Geofisika (2011) jumlah curah hujan di Distrik Arso sebesar 1.919,5 mm dengan rata-rata curah hujan 159,96. Hari hujan sepanjang 2011 sebanyak 124 hari.



Grafik 1.1

4.2. Analisis Ketersediaan Sarana dan Prasarana

Tidak lancarnya perdagangan antar daerah (*intra-trade*) disebabkan oleh keterbatasan transportasi dan komunikasi. Tidak lancarnya arus barang dan jasa antar daerah mempengaruhi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah melalui sisi permintaan dan sisi penawaran. Infrastruktur jalan yang menghubungkan antar kampung di Distrik Arso Timur masih belum baik karena masih banyak jalan yang rusak serta belum terjamah pengaspalan. Hal ini mengakibatkan transportasi menjadi hal yang sedikit sulit bagi masyarakat untuk memasarkan hasil pertaniannya, terutama bagi masyarakat yang tinggal pada daerah kampung garis belakang di Distrik Arso Timur. Hal ini tentu akan menyebabkan kurangnya mobilitas penduduk, yang berdampak pada lambatnya pertumbuhan ekonomi. Sarana Telekomunikasi di Distrik Arso Timur saat ini masih terdapat daerah yang belum terjangkau signal handphone serta siaran televisi seperti pada kampung Yetty, Kriku, Sangke Kibay dan Skofro. Keterbatasan tersebut mengakibatkan kurang lancarnya perdagangan antar daerah (*intra-trade*) yang merupakan unsur menciptakan ketimpangan ekonomi regional.

Infrastruktur jalan yang menghubungkan antar kampung masih belum baik karena masih banyak jalan yang rusak serta belum terjamah pengaspalan, hal ini menyebabkan transportasi menjadi hal yang sedikit sulit bagi masyarakat, terutama bagi masyarakat yang tinggal pada daerah kampung garis belakang di Distrik Arso Timur. Hal ini tentu akan menyebabkan kurangnya mobilitas penduduk yang berdampak pada lambatnya pertumbuhan ekonomi. Dikarenakan posisi beberapa kampung yang masih sulit untuk dijangkau serta kondisi jalan yang masih belum baik di sebagian besar wilayah kampung Distrik Arso Timur mengakibatkan harga barang kebutuhan pun sedikit lebih tinggi atau mahal jika dibandingkan dengan beberapa distrik lain di Kabupaten Keerom. Ketersediaan dan kondisi infrastruktur di Distrik Arso Timur merupakan salah satu kendala dalam mengembangkan sektor pertanian. Karena hal tersebut secara tidak langsung mempengaruhi supply dan demand. Selain itu juga mempengaruhi distribusi, pemasaran dan tidak dapat bersaing harga. Kondisi permukaan jalan yang masih berupa tanah sangat mengganggu terutama di musim penghujan. Jalan akan becek dan licin sehingga mengganggu pengguna jalan baik pejalan kaki maupun yang berkendara.

Tabel 4.8

Jenis Permukaan Jalan Terlulus Menurut Kampung/ *Type of Road Surfaces by Village 2011*

Kampung	Jenis Permukaan Jalan	Jenis Permukaan Jalan Terluas
(1)	(2)	(3)
1. Wambes	4	2
2. Wambi	3	1
3. Wonorejo	4	2
4. Yamari	6	2
5. Yetty	6	2
6. Kiku	1	1
7. Sangke	1	1
8. Kibay	1	1
9. Piani	7	2
10. Sukun	4	2
11. Skofro	1	1

Sumber: Kantor Distrik Arso Timur

Keterangan (Pengambilan):

1. Aspal
2. Dipetkeras (Kerikil, Karang & Batu)
4. Dapat Di Lulusi Kendaraan Roda 4
5. Tanah
6. Beton Cor Blok Semen Campuran

Selain permasalahan jalan, Distrik Arso Timur juga terkendala dengan listrik dan air bersih. Jumlah kampung yang telah teraliri listrik PLN di Distrik Arso Timur pada tahun 2011 sebanyak 5 kampung, dengan jumlah total 560 pelanggan. 6 kampung lainnya menggunakan listrik dari Genset yang di kelola secara swadaya, untuk jumlah rumah tangga pelanggan terbesar listrik PLN adalah di Kampung Wonorejo. Total penjualan listrik selama 2011 sebesar 7.744.386 Kwh. Penjualan listrik terbesar diarahkan pada pelanggan rumah tangga yaitu sebesar 5.717,251 Kwh atau sebesar 73.9 % dari total penjualan. Sedangkan yang terkecil ada pada pelanggan industri yaitu sebesar 582 Kwh atau 0.1 % persen dari seluruh daya listrik yang terdapat di Distrik Arso Timur.

4.3. Analisis Peran Sektor Pertanian Bagi Pengembangan Ekonomi Lokal Melalui Pendekatan Klaster di Distrik Arso Timur

Pembangunan perekonomian suatu daerah saat ini masih belum mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara signifikan. Hal tersebut disebabkan karena pola pengembangan ekonomi daerah / lokal yang sedang dan telah dilaksanakan oleh daerah terkesan kurang sistematis. Faktor-faktor tersebut menjadi penyebab dari kurang berkembangnya potensi

ekonomi daerah dan berakibat rendahnya daya saing ekonomi daerah. Rendahnya daya saing ekonomi daerah tersebut pada akhirnya menyebabkan arus masuknya investasi menjadi kurang signifikan. Untuk itulah, agar pengembangan ekonomi daerah dapat berhasil dan berdaya guna, maka perlu diupayakan pengembangan potensi ekonomi daerah melalui pengembangan ekonomi lokal (PEL). Namun demikian, agar pengembangan ekonomi lokal tersebut mampu berkesinambungan dan memberikan dampak pengganda yang besar bagi produk-produk lainnya, maka seyogyanya pengembangan ekonomi lokal dimaksud didesain melalui basis kluster (*clustering*).

Dengan berbasis kluster, maka pengembangan ekonomi lokal memperhatikan keterkaitan (*linkages*) dengan unsur-unsur pendukungnya (industri input/pemasok, BDS, Perguruan Tinggi, Pasar dan sebagainya), sehingga tercipta keterkaitan yang kuat dan mampu menopang pengembangan ekonomi lokal secara berkelanjutan. Pengembangan ekonomi lokal ini juga harus berlangsung secara efektif dan efisien, tidak saja memiliki keterkaitan dengan unsur-unsur pendukungnya, namun juga dikembangkan dalam manajemen mata rantai, sehingga setiap kegiatan pengembangannya, mulai dari bahan baku, pengolahan, pergudangan, distribusi dan pencapaian pasar sasaran dapat dilakukan dengan lebih efisien (biaya produksi yang lebih rendah), tepat waktu, tepat jumlah dan tepat distribusi (Sa'id, 2007).

Kemampuan suatu daerah dalam memilih secara tepat potensi ekonomi daerah untuk dijadikan sebagai subyek pengelolaan inovasi akan menjadi salah satu kunci keberhasilan pembangunan ekonomi daerah tersebut (Atang Sulaeman dan Ignatius Subagjo, 2011). Dalam era otonomi daerah dewasa ini, tidak dapat dipungkiri bahwa kecepatan dan optimalisasi pembangunan wilayah (daerah) tentu akan sangat ditentukan oleh kapasitas dan kapabilitas sumberdaya ekonomi (baik sumberdaya alam maupun sumberdaya manusia). Kepemilikan sumberdaya alam dan sumberdaya manusia berkualitas yang terbatas dapat menimbulkan kemunduran yang sangat berarti dalam dinamika pembangunan ekonomi daerah. Konsekuensi lain yang ditimbulkan sebagai akibat terbatasnya kapasitas dan kapabilitas sumberdaya ekonomi yang dimiliki daerah adalah ketidaklulusan daerah yang bersangkutan untuk mengarahkan program dan kegiatan pembangunan ekonominya, dan situasi ini menyebabkan munculnya pula disparitas pembangunan ekonomi wilayah.

Kondisi ini tampaknya menjadi tak terhindarkan terutama bila dikaitkan dengan pelaksanaan otonomi daerah dewasa ini. Salah satu penyebab munculnya ketimpangan

pembangunan ekonomi antar wilayah yaitu adanya perbedaan dalam karakteristik limpahan sumberdaya alam (*resources endowment*) dan sumberdaya manusia (*human resources*) disamping beberapa faktor lain yang juga sangat krusial seperti perbedaan demografi, perbedaan potensi lokasi, perbedaan aspek aksesibilitas dan kekuasaan (*power*) dalam pengambilan keputusan serta perbedaan aspek potensi pasar.

Dengan pola analisis bahwa pengelolaan, ketersediaan, dan kebijakan yang tepat, relevan serta komprehensif amat dibutuhkan dalam kaitannya dengan pengembangan ekonomi lokal dan penguatan tatanan ekonomi lokal yang pada gilirannya dapat menjamin keberlanjutan proses pengembangan ekonomi yang dimaksud. Namun amat disayangkan, dinamika pelaksanaan pengembangan ekonomi lokal (PEL) dalam era otonomi daerah dewasa ini, memiliki atau menampakkan suatu kedenderungan dimana daerah yang kaya akan sumberdaya alam lebih cepat menikmati kemajuan pembangunan bila dibandingkan dengan wilayah lain yang miskin akan sumberdaya alam, hal ini diperparah lagi dengan keterbatasan kualitas sumberdaya manusia. Apabila kondisi seperti ini terus berlanjut maka tidaklah terlalu mengherankan manakala isu tentang ketimpangan pembangunan antara wilayah (kawasan) yang merebak di akhir Pembangunan Jangka Panjang Tahap Pertama yang lalu, kembali muncul dengan sosok yang semakin mengkhawatirkan.

Kegiatan sebagian besar masyarakat di Distrik Arso Timur didominasi oleh kegiatan pertanian atau agribisnis, termasuk didalamnya usaha industri (pengolahan) pertanian, perdagangan hasil-hasil pertanian, perdagangan agribisnis hulu (sarana pertanian dan permodalan), agrowisata dan jasa pelayanan.

Industri pengolahan utamanya digerakkan oleh sub-sektor industri besar/ sedang dengan industri pengolahan kelapa sawit sebagai kontributor terbesar. Distrik Arso Timur yang mempunyai lahan kelapa sawit yang cukup luas terdapat industri pengolah kelapa sawit menjadi CPO, industri tersebut masuk dalam kategori industri besar/ sedang. Selama tahun 2006-2008 laju pertumbuhan sub-sektor industri besar/ sedang cenderung menurun, beberapa penyebabnya adalah turunnya harga CPO dunia dan kapasitas volume pengolahan pabrik yang kurang sehingga banyak buah sawit yang busuk dan beberapa hasil sawit dibawa ke kabupaten lain untuk diolah disana.

Dengan laju pertumbuhan sebesar 6,86 persen pada 2013, subsektor industri besar/ sedang mengalami sedikit kenaikan laju pertumbuhan dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 6,80 persen. Kenaikan laju pertumbuhan juga menyebabkan

kontribusi subsektor ini terhadap PDRB Kabupaten Keerom naik. Pada tahun 2013 subsektor industri besar/sedang berkontribusi sebesar 7,43

Peran sektor pertanian dianalisis melalui perspektif wilayah dengan mengkaji peran sektor pertanian secara kewilayahan. Unit analisisnya adalah kegiatan sektor pertanian dan industri pengolahannya. Apa dan sejauh mana peran sektor pertanian dalam mengembangkan perekonomian lokal merupakan pertanyaan utama yang harus dijawab. Sementara itu, secara mikro akan dikaji peran sektor pertanian.

Suatu wilayah atau kawasan sentra produksi pangan (agropolitan) bisa dipetakan berdasarkan potensi sektor unggulan suatu usaha pertanian dari wilayah tersebut. Cakupan wilayah kawasan sentra produksi pangan (agropolitan) terbagi atas tipologi pertanian:

- a. Sektor usaha pertanian tanaman pangan;
- b. Sektor usaha pertanian hortikultura;
- c. Sektor usaha perkebunan;
- d. Sektor usaha peternakan;
- e. Sektor usaha perikanan darat;
- f. Sektor usaha perikanan laut;
- g. Sektor usaha agrowisata;
- h. kawasan hutan wisata konservasi alam.

Peran sektor pertanian dalam pengembangan ekonomi lokal masyarakat di Distrik Arso Timur melalui pendekatan klaster dapat memberikan kesejahteraan masyarakat. Konsep ini diyakini mampu mengangkat martabat masyarakat setempat dengan meningkatkan kemampuan perekonomian mereka. Sektor pertanian dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena:

1. Menumbuh kembangkan pusat pertumbuhan ekonomi baru berbasis pertanian (agribisnis);
2. Membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat di Distrik Arso Timur melalui kegiatan-kegiatan ekonomi berbasis agribisnis;
3. Menumbuh kembangkan lembaga-lembaga ekonomi di distrik;
4. Meningkatkan pendapatan masyarakat; dan
5. Mewujudkan tata ruang ideal antara kota dengan desa yang saling mendukung melengkapi dan memperkuat.

5. KESIMPULAN

Salah satu aspek penting dalam perencanaan pembangunan daerah adalah dengan pengembangan ekonomi lokal yang mampu menciptakan daya ungkit tinggi dan mampu menjadi penarik sektor lain untuk bergerak dan bertumbuh.

1. Potensi alam di Distrik Arso Timur sangat cocok untuk pertanian perkebunan khususnya tanaman kakao serta ternak sapi. Budaya masyarakat desa yang menganggap kegiatan

pertanian merupakan kegiatan turun temurun dan harus dipertahankan.

2. Pengembangan potensi ekonomi lokal di Distrik Arso Timur dapat diraih dengan cara pengembangan kerjasama dengan pemerintah dan swasta baik di sektor pertanian. Kerjasama di bidang pertanian misalnya peningkatan teknologi pertanian dan peningkatan nilai tambah hasil pertanian mengingat sebagian besar hasil pertanian merupakan bahan yang tidak tahan lama.
3. Dengan pendekatan klaster, maka pengembangan ekonomi lokal sektor pertanian memperhatikan keterkaitan (*linkages*) dengan unsur-unsur pendukungnya, sehingga tercipta keterkaitan yang kuat dan mampu menopang pengembangan ekonomi lokal di sektor pertanian secara berkelanjutan.

Daftar Pustaka

- Distrik Arso Timur Dalam Angka Tahun 2013. 2013. Badan Pusat Statistik Kabupaten Keerom. Kabupaten Keerom
- Kurniawan, Dicky. 2010. Alternatif Pengembangan Ekonomi Lokal Di Kota Pontianak Studi Kasus Pertanian Lidah Buaya Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota, Vol. 21 No. 1, April 2010, hlm. 19 – 36
- Nazir, Moh. 2013. Metode Penelitian. Ghalia Indonesia. Bogor.
- Saragih, Jef Rudianto. 2014. Perencanaan Wilayah dan Pengembangan Ekonomi Lokal Berbasis Pertanian. Pustaka Belajar. Yogyakarta
- Sjafrizal. 2012. Ekonomi Wilayah dan Perkotaan. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Sugiyono. 2013. Metode Penelitian. Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.
- Sulaeman, Atang. Panduan Umum Prakarsa Penguatan Inovasi Daerah. RTRW Kabupaten Keerom Tahun 2014